



LKjID 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**KANTOR KECAMATAN LONG IKIS
KABUPATEN PASER**



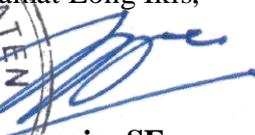
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas izin dan perkenan Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tahun pertama yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Long Ikis selama tahun 2023.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih banyak kekurangannya, sehingga kami mengharapkan evaluasi yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan di tahun berikutnya. Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP ini.

Long Ikis, 16 Februari 2024
Camat Long Ikis,

Arnain, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19660705 198703 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Organisasi	4
1.4 Isu-isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja SKPD	19
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Pengukuran Kinerja 2023	
3. Rencana Aksi 2023	
4. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan	
5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	
6. SOP Pengumpulan Data Kinerja	
7. SK Tim Penyusun LkjIP	
8. LHE SAKIP Tahun 2022	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Long Ikis Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026 yaitu: **“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera (Paser MAS)”**.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut sebagai berikut:

- 1) Misi ke 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif

- 2) Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat desa

Sasaran : 1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Adapun indikator tujuan dan sasaran yang menjadi acuan dan tolok ukur Kecamatan Long Ikis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



	Yang Responsif Dan Tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional, pada tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Long Ikis mendapatkan Alokasi Dana dari APBD Perubahan Kabupaten Paser sebesar Rp. 8.436.812.547,00 (*Delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

Anggaran pada tahun 2023 ini mampu terserap dan terealisasi sebesar Rp. 8.093.134.079,00 (*Delapan milyar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) atau terserap sebesar 95,93% dari seluruh total anggaran yang disediakan. Anggaran tersebut telah digunakan untuk merealisasikan 6 program, 14 kegiatan, dan 27 sub kegiatan pada kantor Kecamatan Long Ikis serta 2 program, 5 kegiatan, dan 10 sub kegiatan pada kantor Kelurahan Long Ikis.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RENSTRA 2021-2026. Capaian indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis Kecamatan Long Ikis tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Pencapaian sasaran strategis 1 **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”**. Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”** adalah nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Paser. Pada saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP



oleh Inspektorat Kabupaten Paser atas dokumen SAKIP Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2023, sehingga indikator kinerja sasaran strategis **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”** belum dapat ditentukan capaian relisasinya. Namun pada tahun 2022 capaian Nilai SAKIP Kecamatan Long Ikis adalah 63,99 dengan predikat **“Baik”**;

- b) Pencapaian sasaran strategis 2 **“meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”**. Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”** adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pada tahun 2023 capaian Nilai IKM Kecamatan Long Ikis adalah 79,67 dari target 82, atau 97,15% (265 responden);
- c) Pencapaian sasaran strategis 3 **“meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif”**. Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif”** adalah angka kriminalitas. Pada tahun 2023 capaian angka kriminalitas Kecamatan Long Ikis adalah 41,85 dari target 51 (jumlah kasus kejahatan 17 kasus).

Angka kriminalitas di Kecamatan Long Ikis untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, yaitu 34,5 menjadi 41,85. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah kejahatan yang terjadi sebanyak 3 kasus, yaitu dari 14 kasus (2022) menjadi 17 kasus (2023). Dari hasil capaian ini dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah perbaikan ke depannya untuk menjaga kondusifitas lingkungan di wilayah kecamatan Long Ikis guna menekan angka kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

- d) Pencapaian sasaran strategis 4 **“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”**.

Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”** adalah persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dan telah tercapai sebesar 100%. Sebagai langkah tindak lanjut yang dapat diambil oleh Kecamatan Long Ikis bersama dengan Kasi PMD dan juga Kelurahan adalah memantau dan menjaga peran aktif dari seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam proses pembangunan



Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Long Ikis tahun 2023 dalam mencapai target masih berkinerja “BAIK” walaupun terdapat target sasaran strategis yang tidak tercapai secara maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kecamatan Long Ikis menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Adapun kebijakan langkah strategi yang akan dilakukan guna perbaikan/peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang semakin berkembang serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi baik secara intern di lingkungan Kecamatan Long Ikis maupun dengan sesama Kecamatan lain, juga dengan Instansi teknis di tingkat Kabupaten.
3. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk menggalakkan digitalisasi pelayanan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan.
4. Melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan serta dipublikasikan guna memenuhi kriteria penilaian SAKIP.

Dengan tekad dan semangat kerja yang tinggi maka seluruh komponen Aparatur Kantor Camat dan Lurah Long Ikis dengan didukung fasilitas pelayanan yang memadai berupaya dengan sungguh – sungguh untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Long Ikis, 16 Februari 2024
Camat Long Ikis,

Arnain, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19660705 198703 1 007



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah namanya menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunannya, yaitu :

- 1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.



- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Lembaga Administrasi Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.
- 11) Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.
- 12) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 13) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 14) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 15) Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 59 tahun 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026 tahun pertama yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Long Ikis selama tahun 2023.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Long Ikis ini antara lain adalah:

- 1) Memberikan informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis yang terukur selama Tahun Anggaran 2023 kepada pemberi mandat (Bupati Paser) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Long Ikis dan sekaligus sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Long Ikis untuk penyusunan rencana kegiatan Kecamatan Long Ikis pada tahun berikutnya dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



1.3 GAMBARAN ORGANISASI

Kecamatan Long Ikis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan Long Ikis dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;



- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
- 9) penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Camat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Susunan organisasi Kecamatan, yang terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Long Ikis terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat;



- 7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Kelurahan.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

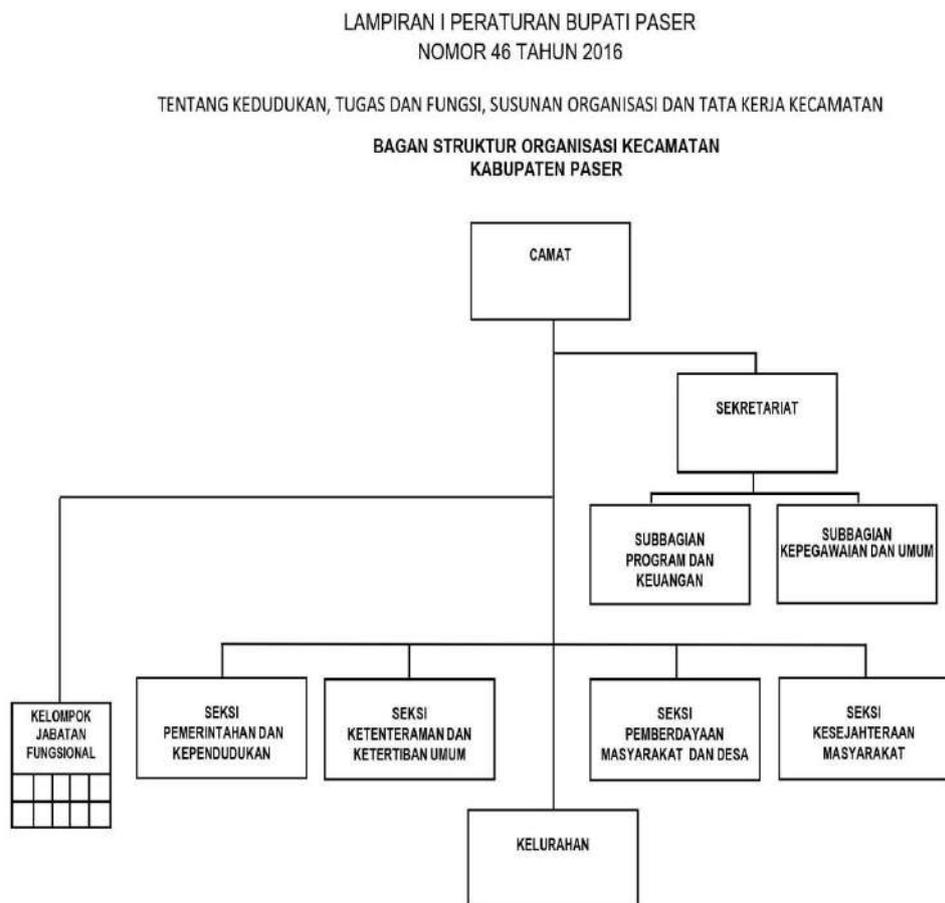
Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.



Pada kecamatan dan kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan Long Ikis diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016

1.4 Isu-Isu Strategis

Secara umum, kondisi urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan



di tahun 2023, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan Long Ikis telah berjalan baik dan perlu ditingkatkan.

Selama tahun 2023 tidak ada permasalahan signifikan yang terjadi. Akan tetapi, ada beberapa anggaran belanja yang mendapat alokasi tambahan pada pelaksanaan APBD perubahan tahun 2023 yaitu dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten XVII Tahun 2023 sebesar Rp. 292.911.960,00.

Penambahan beberapa pagu atas belanja kegiatan juga terjadi pada tahapan Perubahan APBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah yang harus direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana telah ditetapkan atas target program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun kedua dari periode Renstra 2021-2026. Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Long Ikis mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kantor Kecamatan Long Ikis tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kantor Kecamatan Long Ikis dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026 yaitu: ***“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”***, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Long Ikis untuk mengimplementasikan visi tersebut sebagai berikut:

1) Misi ke 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif

2) Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat desa



Sasaran : 1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Long Ikis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam rentang tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju Adil, dan Sejahtera		
MISI 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peyusunan dan Penerapan Standar pelayanan publik
	3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda	Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa	Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa
MISI 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		
Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Meningkatkan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan	Peningkatan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di kecamatan
		Meningkatkan peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan	Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan dalam kegiatan pembangunan

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Long Ikis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Camat Long Ikis Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Penetapan



Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Long Ikis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Long Ikis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari Kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Camat Long Ikis selaku kepala Perangkat Daerah berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARNAIN, SE.**
Jabatan : Camat Long Ikis
Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung **pihak pertama,**
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI PASER**

dr. FAHMI FADLI

**PIHAK PERTAMA
CAMAT LONG IKIS**

ARNAIN, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660705 198703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR CAMAT LONG IKIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	51
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%

Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.727.644	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.008.377.798	APBD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.089.600	APBD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.049.188	APBD
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.005.596	APBD
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.356.750	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	109.520.000	APBD
	8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	236.310.818	APBD



3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	165.392.470	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	229.680.000	APBD
		11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.050.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.200.000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.405.000	APBD
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14. Pemberdayaan Kelurahan	408.442.000	APBD

Tana Paser, Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

PIHAK PERTAMA
CAMAT LONG IKIS

ARNAIN SE
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19660705 198703 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARNAIN, SE.**
Jabatan : Camat Long Ikis
Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung **pihak pertama,**
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Oktober 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI PASER**

dr. FAHMI FADLI

**PIHAK PERTAMA
CAMAT LONG IKIS**

ARNAIN, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660705 198703 1 007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KANTOR CAMAT LONG IKIS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	51
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%

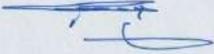
Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.302.644	APBD-P
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.284.756.539	APBD-P
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.169.600	APBD-P
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.363.918	APBD-P
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.831.100	APBD-P
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.605.360	APBD-P
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.298.699	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		



	yang ada di Kecamatan			
	9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	743.709.960	APBD-P	
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	380.127.470	APBD-P	
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	237.160.000	APBD-P	
	12. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.500.000	APBD-P	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.635.001	APBD-P	
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.575.000	APBD-P	
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15. Pemberdayaan Kelurahan	766.181.960	APBD-P	

Tana Paser, Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI PASER


dr. FAHMI FADLI

PIHAK PERTAMA
CAMAT LONG IKIS


A.R. VAIN. SE
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19660705 198703 1 007



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi.

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan



membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja: (Realisasi : Target) x 100\%}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja: } ((\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target}) : \text{Target})) \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja level sasaran, untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator.

Hasil pengukuran penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat yang mengacu pada formulir tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:



Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$90,01\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja atas indikator kinerja level sasaran strategis Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Long Ikis dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Level Sasaran
Kecamatan Long Ikis tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70	-	-	Belum dievaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM	82	79,67	97,15%	
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	51	41,85	100,17%	
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	
					77,54%	



2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2022 dan 2023 dijabarkan sebagai berikut:.

Tabel 3.1.2.
Capaian Indikator Kinerja Level Sasaran
Kecamatan Long Ikis tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	65	63,99	98,44%	70	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM	80	82,56	103,20%	82	79,67	97,15%
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	34,5	133%	51	41,85	100,17%
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah					Realisasi	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	65	70	72	75	81	63,99	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	84	86	88	82,56	79,67
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	34,5	41,85
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian sasaran kedua yaitu Nilai IKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis tidak ada yang termasuk dalam standar nasional sehingga realisasi kerjanya tidak dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.1.4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	STANDAR NASIONAL
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM	82	79,67	97,15%	-
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	51	41,85	100,17%	-
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	-



5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berikut ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Long Ikis tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,15%	√	-	-	-	-
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	100,17%	√	-	-	-	-
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/keurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Persentase desa/keurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	√	-	-	-	-

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

a) Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain karena adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan sumber daya aparatur, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai.

- Sasaran strategis “Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif”

Dari tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja untuk sasaran “meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif” dengan indikator kinerja angka kriminalitas menunjukkan predikat “sangat tinggi”. Indikator



angka kriminalitas mendapat persentase capaian 100,17% dengan realisasi capaian 41,85 dari target nilai 51. Indikator ini menggunakan trend menurun. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator “angka kriminalitas” diantaranya adalah:

- a) Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Long Ikis dengan instansi vertikal yang berada di wilayah kecamatan (Muspika) untuk bersinergi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Long Ikis.
 - b) Adanya sosialisasi dan monitoring terhadap penegakan peraturan dan perundang-undangan serta Perda dan Perkada untuk menjaga kondusifitas lingkungan di wilayah Kecamatan Long Ikis.
- Sasaran strategis “Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Dari tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja untuk sasaran “Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan” dengan indikator kinerja Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan menunjukkan predikat “sangat tinggi” dengan persentase capaian 100%.

Hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator tersebut adalah karena seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Long Ikis telah memiliki lembaga kemasyarakatan.

- b) Analisis penyebab kegagalan
 - Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”



Dari tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja untuk sasaran “meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dengan indikator kinerja nilai IKM menunjukkan predikat “sangat tinggi”. Meski mendapat predikat “sangat tinggi”, tetapi indikator sasaran strategis ini tidak mencapai target yang ditentukan. Indikator nilai IKM Kecamatan mendapat persentase capaian 97,15% dengan realisasi capaian nilai IKM 79,67 dari target nilai 82.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator nilai IKM ini antara lain:

- a) Adanya penilaian dari masyarakat (65 dari 265 responden) memberi nilai “cukup” pada kualitas sarana dan prasarana pelayanan dikarenakan adanya kerusakan pada alat perekaman KTP, sehingga masyarakat harus melakukan pelayanan perekaman KTP langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, dimana hal ini memakan waktu dan biaya yang cukup besar (jarak kecamatan ke kabupaten cukup jauh).
- b) Tinta printer yang digunakan untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) habis sehingga harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan tinta yang baru. Hal ini mengganggu pelayanan karena proses penggantian tinta printer memakan waktu beberapa hari.
- c) Adanya perbaikan/renovasi ruang pelayanan sehingga mengganggu proses pelayanan dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman.

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Long Ikis sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan maupun mengupayakan pencapaian target, diantaranya adalah:



- a) Menugaskan pegawai di *front office* untuk melayani dan mengarahkan masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan.
- b) Melakukan koordinasi dan melaporkan kerusakan alat kepada instansi terkait guna dilakukan perbaikan demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi internal pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan.
- d) Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target kinerja dari sasaran strategis dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \text{\%tase Capaian Kinerja} - \text{\%tase Penyerapan Anggaran} \times 100\%$$

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0%	98,09%	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,15%	98,89%	-1,74%
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	100,17%	97,35%	2,82%



4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	99,36%	0,64%
----	--	--	------	--------	-------

Berdasarkan tabel di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100% tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis Kecamatan Long Ikis tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” telah mencukupi dengan capaian penyerapan anggaran 98,89% dan capaian kinerja 0% sehingga belum dapat ditentukan terkait efisiensi penggunaan sumber dayanya.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” telah mencukupi dengan capaian penyerapan 98,89% dan capaian kinerja 97,15% serta terjadi inefisiensi sumber daya sebesar 1,74% karena capaian kinerja lebih rendah daripada capaian anggaran. Inefisiensi tersebut terjadi karena capaian indikator kinerja “nilai IKM” lebih rendah dari nilai yang ditargetkan.
- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif” telah mencukupi dengan capaian penyerapan 97,35% dan capaian kinerja 100,17% serta terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,82%. Efisiensi tersebut terjadi karena ada beberapa sisa anggaran dari belanja yang tidak terealisasi,



yaitu belanja perjalanan dinas biasa pada kegiatan pembinaan FKDM yang hanya diikuti oleh Kasi Trantibum saja.

- 4) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan” telah mencukupi dengan capaian penyerapan 100% dan capaian kinerja 100%. Dalam hal ini tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya karena capaian kinerja sama dengan capaian anggaran.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tentunya tidak dapat dicapai dengan sendirinya. Adanya program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya progra/kegiatan tersebut menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Long Ikis tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	103,93%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti; Persentase LHP nihil	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai \geq 100	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	75,00%	Menunjang



				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100,00%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	50%	Tidak Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	100,00%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,15%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	110,65%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	100,17%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	50%	Menunjang



				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja di atas, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikatakan telah menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, walaupun ada dua program yang capaian indikator kinerjanya hanya 50%. Namun, secara substansial, kedua program tersebut yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah dua program yang merupakan *core bisnis* dari tugas dan fungsi kecamatan. Seluruh kegiatan yang menjadi bagian dari kedua program tersebut juga memiliki capaian kinerja 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua program tersebut telah menunjang keberhasilan capaian pernyataan kinerja Kecamatan Long Ikis.

b) Program dan kegiatan penyebab kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan capaian indikator kinerja telah tercapai 100%, kecuali Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang capaian kinerjanya hanya 50%. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa selama tahun 2023 tidak ada program/kegiatan yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Long Ikis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI	
					K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN LONG IKIS					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 Indeks	5.716.271.392	74,83	5.394.575.090
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100 persen	17.302.644	100	17.302.604
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5 dokumen	7.545.040	5	7.545.000
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPR)	5 dokumen	9.757.604	5	9.757.604
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100 Persen	5.284.756.539	100	4.991.464.871
		Persentase LHP nihil	100 Persen			
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	5.093.828.971	387	4.801.871.703



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Long Ikis - 2023

-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	100 Dokumen	188736768	75	187.402.368
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	15 Laporan	2.190.800	14	2.190.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 100	80 Dokumen	11.169.600	80	11.059.600
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	11.169.600	12	11.059.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian Indeks Kepuasan Sekretariat	100 Laporan	220.026.418	75	212.470.648
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.182.600	1	1.138.800
-	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	96.314.730	8	93.810.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.729.288	6	19.729.288
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.784.800	1	2.784.800
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	95.015.000	80	95.007.760
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100 Persen	4.831.100	75	4.830.000
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.831.100	1	4.830.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	155.606.392	100	144.869.327



-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.006.392	12	70.569.327
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.600.000	12	74.300.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	60 Persen	22.578.699	60	12.578.040
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17.698.699	2	7.698.040
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.880.000	4	4.880.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 Persen	94.575.000	50	94.575.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	25 Desa	94.575.000	25	94.575.000
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	6.680.000	5	6.680.000
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75 dokumen	83.000.000	75	83.000.000
-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	3 Laporan	4.895.000	3	4.895.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82 Indeks	853.229.960	79,67	843.771.570



		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	109.520.000	100	109.520.000
	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	109.520.000	3	109.520.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	743.709.960	100	734.251.570
	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	743.709.960	4	734.251.570
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 Persen	256.660.000	50	255.260.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	237.160.000	100	235.760.000
	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	237.160.000	4	235.760.000
		Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	19.500.000	100	19.500.000
	-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	19.500.000	4	19.500.000



		Republik Indonesia					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	117.635.001	100	112.034.660
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	117.635.001	2	112.034.660
	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	51.510.001	40	51.508.000
	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	66.125.000	50	60.526.660
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	75 Persen	380.127.470	0	375.647.085
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persen	380.127.470	100	375.647.085
	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.460.060	5	2.460.060



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Long Ikis - 2023

-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	377.667.410	4	373.187.025
				7.418.498.823		7.075.863.405

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI	
					T	A
1	2	3	4	5	6	7
	KELURAHAN LONG IKIS					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 Indeks	252.131.764	74,83	251.877.174
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100 Persen	173.075.296	100	173.026.160
		Persentase LHP nihil	100 Persen		100	
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	100 Dokumen	173.075.296	147	173.026.160
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 Persen	53.337.500	80	53.337.100
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.504.000	1	3.504.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.472.500	5	26.472.100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.201.000	1	3.201.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	20.160.000	66	20.160.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	14.998.968	100	14.793.914
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.998.968	12	14.793.914
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	60 Persen	10.720.000	60	10.720.000



-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10720000	3	10720000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	75 Persen	766.181.960	50	765.393.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	766.181.960	100	765.393.500
-	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	4.140.000	3	4.140.000
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	751.091.960	4	750.303.500
-	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.950.000	1	10.950.000
				1.018.313.724		1.017.270.674

2. Menganalisis capaian sasaran strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Camat Long Ikis dan Bupati Paser, adapun sasaran strategis yang merupakan ukuran pencapaian dari tujuan strategis tahun 2023 beserta analisis pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran strategis 1 **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”**.

Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”** adalah nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Paser. Aspek penilaian dan bobot penilaian komponen SAKIP meliputi hal-hal sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%



Pada saat ini belum dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Paser atas dokumen SAKIP Kantor Kecamatan Long Ikis tahun 2023, sehingga indikator kinerja sasaran strategis **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”** belum dapat ditentukan capaian relisasinya.

Adapun Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Long Ikis tahun 2022 yang merupakan Hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dari Inpektorat Nomor: 700/142/LHE/ITDAKAB/IRBAN.III/2023 tanggal 31 Mei 2023 memperoleh nilai total sebesar 63,99 katagori B dengan rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	11,25	22,50
Pengukuran Kinerja	30	4,80	7,71	10,50	23,57
Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,15	4,50	10,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	1,75	2,25	3,75	7,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100				63,99



- b. Pencapaian sasaran strategis 2 **“meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”**.

Indikator kinerja dari sasaran strategis **“meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”** adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pada tahun 2023, survey kepuasan masyarakat dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh masyarakat secara online.

Kriteria mutu pelayanan terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Adapun hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Long Ikis adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Pelayanan	Jumlah Responden yang Mengisi Kuesioner	IKM Unit Pelayanan Berdasarkan Jumlah yang Mengisi	Klasifikasi Mutu Pelayanan
1.	265	265	79,67	Baik

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tersebut diketahui bahwa target sasaran strategis (82) hanya tercapai sebesar 97,15% dari 100% yang ditargetkan.

- c. Pencapaian sasaran strategis 3 **“meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif”**.



Indikator kinerja dari sasaran strategis “*meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif*” adalah angka kriminalitas. Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

Angka kriminalitas diperoleh dengan cara menghitung jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dan dikalikan 100.000. Untuk tahun 2023, Kantor Kecamatan Long Ikis menargetkan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Long Ikis adalah 51. Adapun angka kriminalitas yang terjadi pada Kecamatan Long Ikis sepanjang tahun 2023 dapat dihitung berdasarkan data jumlah kejahatan dari Polsek Long Ikis dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Kecamatan Long Ikis, sebagai berikut:

**Daftar Tindak Kriminalitas
Kecamatan Long Ikis Tahun 2023**

No	Kasus	Jumlah Kasus Pertahun
1	Narkoba	3
2	Pencurian buah sawit	1
3	Pencabulan	1
4	Penggelapan Motor	1
5	Penganiayaan	2
6	Curanmor	9
7		
Jumlah		17

Sumber: Polsek Long Ikis



No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Muara Adang	1.682
2	Teluk Waru	744
3	Tajur	2.981
4	Semuntai	4.681
5	Lombok	1.981
6	Pait	3.530
7	Longikis	1.299
8	Olung	1.690
9	Kayungo	1.110
10	Jemparing	1.821
11	Tiwei	702
12	Belimbing	652
13	Long Gelang	508
14	Krayan Jaya	1.022
15	Bukit Seloka	1.142
16	Krayan Sentosa	1.604
17	Krayan Makmur	897
18	Kayungo Sari	1.805
19	Krayan Bahagia	1.994
20	Sawit Jaya	2.393
21	Sekurou Jaya	1.388
22	Kerta Bhakti	1.597
23	Adang Jaya	493
24	Tajer Mulya	1.660
25	Brewe	332
26	Atang Pait	914
JUMLAH		40.622

Sumber: Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Kecamatan Long Ikis



Berdasarkan data tersebut, maka angka kriminalitas Kecamatan Long Ikis tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah kasus kejahatan} : \text{Jumlah penduduk}) \times 100.000 \\ &= (17 : 40.622) \times 100.000 \\ &= 4,185 \times 100.000 \\ &= 41,85 \end{aligned}$$

Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas
17	40.662	41,85

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Long Ikis untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, yaitu 34,5 menjadi 41,85. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah kejahatan yang terjadi sebanyak 3 kasus, yaitu dari 14 kasus (2022) menjadi 17 kasus (2023).

Dari hasil capaian ini dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah perbaikan ke depannya untuk menjaga kondusifitas lingkungan di wilayah kecamatan Long Ikis guna menekan angka kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

d. Pencapaian sasaran strategis 4 ***“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”***.

Indikator kinerja dari sasaran strategis ***“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”*** adalah persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan



nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Adapun data lembaga kemasyarakatan yang dimiliki oleh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Long Ikis adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga
1.	Kelurahan Long Ikis	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
2.	Desa Semuntai	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
3.	Desa Lembok	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
4.	Desa Pait	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
5.	Desa Sawit Jaya	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
6.	Desa Sekurou Jaya	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
7.	Desa Brewe	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
8.	Desa Kerta Bhakti	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
9.	Desa Long Gelang	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
10.	Desa Tiwei	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
11.	Desa Belimbing	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
12.	Desa Tajur	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
13.	Desa Atang Pait	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
14.	Desa Kayungo Sari	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
15.	Desa Olung	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
16.	Desa Krayan Bahagia	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5



17.	Desa Krayan Makmur	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
18.	Desa Krayan Jaya	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
19.	Desa Krayan Sentosa	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
20.	Desa Bukit Seloka	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
21.	Desa Jemparing	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
22.	Desa Kayungo	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
23.	Desa Tajer Mulya	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
24.	Desa Teluk Waru	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
25.	Desa Muara Adang	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5
26.	Desa Adang Jaya	RT/RW, PKK, Kartar, Posyandu, LPM	5

Berdasarkan data lembaga kemasyarakatan yang dimiliki oleh desa/kelurahan di Kecamatan Long Ikis tersebut, maka target indikator kinerja sasaran **“meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan”**, yaitu persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan tercapai sebesar 100%.

Sebagai langkah tindak lanjut yang dapat diambil oleh Kecamatan Long Ikis bersama dengan Kasi PMD dan juga Kelurahan adalah memantau dan menjaga peran aktif dari seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam proses pembangunan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 REALISASI ANGGARAN KEUANGAN SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Long Ikis telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa



kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional, pada tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Long Ikis mendapatkan Alokasi Dana dari APBD Kabupaten Paser (setelah perubahan) sebesar Rp. 8.436.812.547,00 (*Delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri dari:

- Anggaran Kantor Kecamatan Long Ikis Rp. 7.418.498.823,00
- Anggaran Kantor Lurah Long Ikis Rp. 1.018.313.724,00

Anggaran pada tahun 2023 ini mampu terserap dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 8.093.134.079,00 (*Delapan milyar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) atau terserap sebesar 95,93% dari seluruh total anggaran yang disediakan.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar Rp. 7.844.830.179,00 (*Tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 248.303.900,00 (*Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah*) dan telah digunakan untuk merealisasikan 6 program, 14 kegiatan, dan 27 sub kegiatan pada kantor Kecamatan Long Ikis serta 2 program, 5 kegiatan, dan 10 sub kegiatan pada kantor Kelurahan Long Ikis.

Realisasi anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.2.1.1
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA UNSUR KEWILAYAHAN
(KECAMATAN LONG IKIS & KELURAHAN LONG IKIS)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN LONG IKIS							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 Indeks	5.716.271.392	74,83	5.394.575.090	103,93%	94,37%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100 persen	17.302.644	100	17.302.604	100,00%	29,00%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, profil kecamatan)	5 dokumen	7.545.040	5	7.545.000	100,00%	99,99%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjiP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEFRA)	5 dokumen	9.757.604	5	9.757.604	100,00%	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100 Persen	5.284.756.539	100	4.991.464.871	100,00%	94,45%
		Persentase LHP nihil	100 Persen					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	5.093.828.971	387	4.801.871.703	107,50%	94,27%
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	100 Dokumen	188736768	75	187.402.368	75,00%	99,29%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	15 Laporan	2.190.800	14	2.190.800	93,33%	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 100	80 Dokumen	11.169.600	80	11.059.600	100,00%	99,02%
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	11.169.600	12	11.059.600	100,00%	99,02%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 Laporan	220.026.418	75	212.470.648	75,00%	96,57%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.182.600	1	1.138.800	100,00%	96,30%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Long Ikis - 2023

-	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	96.314.730	8	93.810.000	100,00%	97,40%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.729.288	6	19.729.288	100,00%	79,78%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.784.800	1	2.784.800	100,00%	100,00%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	95.015.000	80	95.007.760	80,00%	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen	4.831.100	75	4.830.000	75,00%	99,98%
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.831.100	1	4.830.000	100,00%	99,98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen	155.606.392	100	144.869.327	100,00%	0,00%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.006.392	12	70.569.327	100,00%	88,20%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.600.000	12	74.300.000	100,00%	98,28%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60 Persen	22.578.699	60	12.578.040	100,00%	55,71%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17.698.699	2	7.698.040	100,00%	43,49%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.880.000	4	4.880.000	100,00%	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			100 Persen	94.575.000	50	94.575.000	50,00%	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			25 Desa	94.575.000	25	94.575.000	100,00%	100,00%
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	6.680.000	5	6.680.000	100,00%	100,00%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75 dokumen	83.000.000	75	83.000.000	100,00%	100,00%
-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	3 Laporan	4.895.000	3	4.895.000	100,00%	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82 Indeks	853.229.960	79,67	843.771.570	97,16%	98,89%



	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	109.520.000	100	109.520.000	100,00%	100,00%
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	109.520.000	3	109.520.000	100,00%	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	743.709.960	100	734.251.570	100,00%	98,73%
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	743.709.960	4	734.251.570	133,33%	98,73%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban</i>	55	Persen	256.660.000	50	255.260.000	90,91%	99,45%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	237.160.000	100	235.760.000	100,00%	99,41%
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	237.160.000	4	235.760.000	100,00%	99,41%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	19.500.000	100	19.500.000	100,00%	100,00%
-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	19.500.000	4	19.500.000	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	Persen	117.635.001	100	112.034.660	100,00%	95,24%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3	kegiatan	117.635.001	2	112.034.660	66,67%	95,24%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Long Ikis - 2023

-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	Orang	51.510.001	40	51.508.000	100,00%	100,00%
-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	66.125.000	50	60.526.660	100,00%	91,53%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	75	Persen	380.127.470	0	375.647.085	0,00%	98,82%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat yang terlaksana	100	Persen	380.127.470	100	375.647.085	100,00%	98,82%
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.460.060	5	2.460.060	100,00%	100,00%
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	377.667.410	4	373.187.025	133,33%	98,81%
					7.418.498.823		7.075.863.405		95,38%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)	
					T	A	T	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KELURAHAN LONG IKIS							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 Indeks	252.131.764	74,83	251.877.174	103,93%	99,90%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100 Persen	173.075.296	100	173.026.160	100,00%	99,97%
		Persentase LHP nihil	100 Persen		100		100,00%	



-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	100 Dokumen	173.075.296	147	173.026.160	147,00%	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 Persen	53.337.500	80	53.337.100	80,00%	100,00%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.504.000	1	3.504.000	100,00%	100,00%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.472.500	5	26.472.100	100,00%	99,99%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.201.000	1	3.201.000	100,00%	100,00%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	20.160.000	66	20.160.000	74,16%	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	14.998.968	100	14.793.914	100,00%	98,63%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.998.968	12	14.793.914	100,00%	98,63%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	60 Persen	10.720.000	60	10.720.000	100,00%	100,00%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10720000	3	10720000	100,00%	100,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	75 Persen	766.181.960	50	765.393.500	66,67%	99,90%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	766.181.960	100	765.393.500	100,00%	99,90%
-	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	4.140.000	3	4.140.000	100,00%	100,00%
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	751.091.960	4	750.303.500	100,00%	99,89%
-	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.950.000	1	10.950.000	100,00%	100,00%
				1.018.313.724		1.017.270.674		99,89%

3.2.2 ANALISIS KEUANGAN KAITANNYA DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Long Ikis mendapatkan Alokasi Dana dari APBD Perubahan Kabupaten Paser sebesar Rp. 7.418.498.823,00 (*Tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empat*



ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan anggaran APBD perubahan untuk kelurahan Long Ikis sebesar Rp. 1.018.313.724,00 (Satu milyar delapan belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Sehingga total keseluruhan anggaran untuk Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 8.436.812.547,00 (Delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Anggaran pada tahun 2023 ini mampu terserap dan terealisasi sebesar Rp. 8.093.134.079,00 (Delapan milyar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau terserap sebesar 95,93% dari seluruh total anggaran yang disediakan. Anggaran tersebut telah digunakan untuk merealisasikan 6 program, 14 kegiatan, dan 27 sub kegiatan pada kantor Kecamatan Long Ikis serta 2 program, 5 kegiatan, dan 10 sub kegiatan pada kantor Kelurahan Long Ikis.

Rincian ikhtisar realisasi anggaran target kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Long Ikis dan Kantor Kelurahan Long Ikis sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.1
Capaian Realisasi Anggaran
Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN LONG IKIS		7.418.498.823	7.075.863.405	95,38%
Sasaran strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	5.716.271.392	5.394.575.090	94,37%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapannya penyusunan dokumen perencanaan PD	17.302.644	17.302.604	29,00%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	7.545.040	7.545.000	99,99%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPPRA)	9.757.604	9.757.604	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	5.284.756.539	4.991.464.871	94,45%



		Persentase LHP nihil			
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.093.828.971	4.801.871.703	94,27%
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	188736768	187.402.368	99,29%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	2.190.800	2.190.800	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 100	11.169.600	11.059.600	99,02%
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.169.600	11.059.600	99,02%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	220.026.418	212.470.648	96,57%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.182.600	1.138.800	96,30%
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96.314.730	93.810.000	97,40%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.729.288	19.729.288	79,78%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.784.800	2.784.800	100,00%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.015.000	95.007.760	99,99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	4.831.100	4.830.000	99,98%
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.831.100	4.830.000	99,98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	155.606.392	144.869.327	93,10%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80.006.392	70.569.327	88,20%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75.600.000	74.300.000	98,28%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	22.578.699	12.578.040	55,71%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Long Ikis - 2023

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17.698.699	7.698.040	43,49%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.880.000	4.880.000	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	94.575.000	94.575.000	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	94.575.000	94.575.000	100,00%
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.680.000	6.680.000	100,00%
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	83.000.000	83.000.000	100,00%
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	4.895.000	4.895.000	100,00%
Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	853.229.960	843.771.570	98,89%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	109.520.000	109.520.000	100,00%
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	109.520.000	109.520.000	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	743.709.960	734.251.570	98,73%
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	743.709.960	734.251.570	98,73%
Sasaran strategis: Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	256.660.000	255.260.000	99,45%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.160.000	35.760.000	99,41%



	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	237.160.000	235.760.000	99,41%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.500.000	19.500.000	100,00%
	- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19.500.000	19.500.000	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	117.635.001	112.034.660	95,24%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	117.635.001	112.034.660	95,24%
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	51.510.001	51.508.000	100,00%
	- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	66.125.000	60.526.660	91,53%
Sasaran strategis: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	380.127.470	375.647.085	98,82%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	380.127.470	375.647.085	98,82%
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.460.060	2.460.060	100,00%
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	377.667.410	373.187.025	98,81%



KELURAHAN LONG IKIS			1.018.313.724	1.017.270.674	99,89%
Sasaran strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	252.131.764	251.877.174	99,90%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	173.075.296	173.026.160	99,97%
		Persentase LHP nihil			
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	173.075.296	173.026.160	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	53.337.500	53.337.100	100,00%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.504.000	3.504.000	100,00%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.472.500	26.472.100	99,99%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.201.000	3.201.000	100,00%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.160.000	20.160.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	14.998.968	14.793.914	98,63%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14.998.968	14.793.914	98,63%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	10.720.000	10.720.000	100,00%
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10720000	10720000	100,00%
Sasaran strategis: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan					
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	766.181.960	765.393.500	99,90%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	766.181.960	765.393.500	99,90%
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.140.000	4.140.000	100,00%
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	751.091.960	750.303.500	99,89%
	- Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10.950.000	10.950.000	100,00%



Dari hasil capaian kinerja keuangan diketahui bahwa ada satu sub kegiatan yang capaian kinerjanya 43,49% dikarenakan ada item rincian belanja yang tidak dapat direalisasikan yaitu belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan. Hal ini dikarenakan surat kendaraan (STNK dan BPKB) tidak diketahui keberadaannya sehingga proses pembayaran pajak menjadi terkendala.

Kecamatan Long Ikis menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Long Ikis tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 serta menggambarkan kinerja Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis selama tahun 2023. Kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Kantor Camat dan Kantor Lurah Long Ikis Tahun Anggaran 2023 dalam realisasi keuangan mencapai 95,93%. Dari hasil pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja dan anggaran pada Kantor Kecamatan Long Ikis telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien tanpa hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan keuangan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Long Ikis terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 PERMASALAHAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah dipenuhi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian bagi Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai perbaikan dan peningkatan capaian target-target pada tahun selanjutnya, antara lain:

- 1) Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Penataan pegawai yang masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan;



- 3) Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan.

4.3 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu saja terdapat hambatan dan permasalahan yang ditemui. Oleh karena itu, Kecamatan Long Ikis memiliki kebijakan langkah strategi yang perlu dilakukan guna perbaikan/peningkatan kinerja Kecamatan Long Ikis ke depan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang semakin berkembang melalui diklat atau bimtek;
- 2) Meningkatkan koordinasi yang bersinergi baik antar seksi, subbag, desa/kelurahan, serta instansi-instansi vertikal lainnya;
- 3) Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk menggalakkan digitalisasi pelayanan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan serta peningkatan kualitas kinerja serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan serta dipublikasikan guna memenuhi kriteria penilaian SAKIP;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai cerminan dari rangkaian kegiatan Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis pada Tahun Anggaran 2023 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Long Ikis, 16 Februari 2024
Camat Long Ikis,

ARNAIN, SE
Pembina Tk. I
NIP. 196607051987031007